TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN *UJRAH* DALAM PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA

SKRIPSI

Oleh:

Aqilah Binti Ali

NIM. C42214161

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Aqilah binti Ali
Nim	: C42214161
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonnomi Syariah
Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Ujrah Di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Kota Kuching, Sarawak.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan

NIM. C42214161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Ujrah Di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Di Kota Kuching,Sarawak Malaysia", yang ditulis oleh Aqilah binti Ali NIM C42214161 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Januari 2019

Pembimbing

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa' ah.M.Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aqilah binti Ali NIM C42214161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis MunaqasahSkripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196303271999032001	NIP. 196310151991031003

Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag, MH.	Siti Tatmamnul Qulub, M.Si
NIP. 197307052011011001	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 14 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AQILAH BINTI ALI
NIM : C42214161
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Aqilahali323@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN UJRAH DI PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL DI KOTA KUCHING SARAWAK, MALAYSIA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2019

Penulis

(Aqilah binti Ali)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah* Di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di Kota Kuching, Sarawak, Malaysia". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana penerapan *ujrah* di PTPTN di Kota Kuching Sarawak, Malaysia. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* di PTPTN di kota Kuching Sarawak, Malaysia.

Metode penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak yang terlibat, yaitu anggota PTPTN, pihak Majlis Agama Islam dan para nasabah. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang penerapan *ujrah* di PTPTN kota Kuching, Sarawak, Malaysia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, penerapan *Ujrah* di PTPTN kota Kuching, Sarawak bermula dari pihak PTPTN yang menggunakan pembiayaan *ujrah* pada pinjaman kepada nasabah, yaitu sebanyak 1% dan berarti para nasabah harus membayar kembali pinjaman berserta *ujrah* yang ditetapkan PTPTN. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan *Ujrah* di PTPTN tidak sesuai dengan hukum Islam yang benar seperti yang dinyatakan oleh PTPTN dan masih mengandung riba seperti pembiayaan konvensional sebelumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya Pihak Fatwa Kebangsaan Malaysia mengkaji kembali *ujrah* di PTPTN supaya tidak sama seperti pembiayaan konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II *AL-UJRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA 18
A. *Ujrah* Dalam Islam 18
B. Fatwa Kebangsaan Malaysia 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENERAPAN PEMBIAYAAN *UJRAH* DI PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) 44

A. Profil PTPTN..... 44

B. Profil Nasabah 48

C. Latar Belakang *Ujrah* yang Di tetatapkan di PTPTN 50

D. Akad *Ujrah* 52

E. Aplikasi Akad *Ujrah*..... 58

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA TERHADAP PENERAPAN *UJRAH* DI PEERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) DI KOTA KUCHING, SARAWAK 62

A. Analisis Akad *Ujrah* di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di Kota Kuching, Sarawak..... 62

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah* di PTPTN di Kota Kuching, Sarawak 65

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

1.1 Carta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *Ujrah.*

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* ganti kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[1]

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[2]

Dalam hukum Islam terdapat beberapa akad, salah satunya yaitu upah. Sebelum membahas tentang upah seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah.* Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan

[1] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.
[2] Department pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2000), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Amir Syarifuddin mendefinisikan *ijārah* secara sederhana yaitu akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *ijārah*.[3]

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran upah kerja yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.[4]

---

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.
[4] Muhammad Syafi i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian upah itu hendaknya berdasarkan akad kontrak perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al- Quran juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Hukum asal *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara rinci, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum yang membolehkan upah dalam firman Allah yang tertuang dalam QS Ath- Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّ جْدِ كُمْ وَلاَتُضَارُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ
أُولاَتِ حَمَلٍ فَاَ نْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَ تُوْ هُنَّ أُجْرَهُنَّ
وَأْتَمِرُوْ ابَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَا سَرْ تُمْ فَسَتُرْ ضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa, meski seorang suami istri sudah bercerai atau berpisah, namun sang istri dalam keadaan hamil, maka suami memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada istri tersebut, seperti memberikan biaya persalinan, dan jika si suami ingin anaknya yang disusui oleh sang istri, maka sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau imbalan atas jasa yang diberikan sang istri.

Hukum telah mengatur peraturan-peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari seperti upah. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan secara wajar. Namun, tidak semua lembaga yang memberikan pinjaman kepada mahasiswa untuk pendidikan menggunakan akad *Ujrah*, contohnya lembaga yang menggunakan akad *Ujrah* adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah disahkan di bawah akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (akta 566) yang mulai berkuatkuasa pada 1 Juli 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana , off Jalan Samantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur. PTPTN berfungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penyedia pinjaman dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan Tinggi dan mengambil kembali pinjaman yang telah dipinjam kepada nasabah.

Sebelum akad *Ujrah* dilaksanakan di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN hanya menggunakan pinjaman berasaskan konvensional yaitu menggenakan tambahan biaya sebanyak 3% yang dikatakan untuk kegunaan kos perkhidmatan (biaya admnistrasi) bagi penanggung kos pengurusan dan penyelarasan berbanding 1% kos perkhidmatan (biaya administrasi) yang dikenakan pada akad *ujrah* yang juga digunakan untuk kegunaan kos perkhidmatan (biaya administrasi) seperti konvensional. Akad *Ujrah* adalah salah satu akad yang digunakan dalam ekonomi Islam. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, PTPTN tidak sesuai menggunakan akad *Ujrah* karena PTPTN adalah sebuah lembaga yang memberikan pinjaman keuangan kepada mahasiswa yang menggunakan kos perkhidmatan (biaya admnistrasi) yang ditetapkan oleh pihak PTPTN itu sendiri.[5]

Berkenaan dengan kos perkhidmatan (biaya administrasi) pula, Majlis Syariah AAOIFI dan Majlis Fiqh Sedunia di bawah OIC (Persidangan Negara-Negara Islam), mengeluarkan keputusan yang jelas dengan menyatakan bahwa kos bagi perkhidmatan (biaya administrasi) hanya

[5] www.ptptn.com.my

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan dengan syarat biaya itu adalah biaya tambahan untuk pengurusan teknis sebenar. Apabila biaya tambahan yang dikenakan melebihi biaya yang sebena, maka haram. Putusan Syariah AAOIFI ini adalah seiring dengan keputusan No.13 ayat (13) yang dikeluarkan oleh Majma Fiqh Al- Dawli atau majlis Fatwa OIC. Ini bermakna sebarang biaya yang dikenakan harus berasaskan biaya pengurusan yang sebenar dan bukannya sekadar meletakkan persen seperti 1 persen, 2 persen, 3 persen daripada jumlah pinjaman. Inilah yang dikatakan riba karena manfaat yang di peroleh daripada nilai hutang yang diberikan bukan berdasarkan biaya pengurusan sebenar.

Sebaliknya yang diberikan Majlis Fatwa OIC ialah apabila biaya yang dikenakan berdasarkan biaya pengurusan yang sebenarnya tanpa terikat kepada nilai hutang peminjam. Sebagai contoh, sekiranya biaya pengurusan yang sebenarnya adalah termasuk biaya dokumentasi, peguam, pajak, materai dan lain-lain bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM600. Maka biaya tersebut boleh dikenakan kepada peminjam tanpa menggira jumlah atau nilai hutang yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari penerapan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di kuching Sarawak:

1. Praktek pembiayaan *ujrah*.
2. Golongan yang meminjam keuangan pelajaran di PTPTN.
3. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman PTPTN.
4. Akad yang digunakan dalam transaksi.
5. Tinjauan hukum islam terhadap penerapan pembiayaan *Ujrah* dalam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Kuching, Sarawak.

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Penerapan pembiayaan *ujrah* di PTPTN.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa Ulama terhadap pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching, Kota Sarawak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *ujrah* Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional di Bandar Kuching Kota Sarawak?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching Kota Sarawak?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian pustaka, peneliti belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini dengan lapangan di Kota Sarawak.

Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian serupa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wan Fatimah Zahraa binti Wan Shahrudddin yang berjudul "Analisis pembiayaan PTPTN berasaskan *Ujrah*". Skripsi ini membahas terperinci tentang pembiayaan PTPTN berasaskan *Ujrah*. Dalam Skripsi ini beliau mengatakan cara penggiraan *Ujrah* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan PTPTN masih bersandarkan nisbah peratusan daripada jumlah pinjaman , bukan yang ditetapkan Syarak.[6]

2. Persepsi pelajar tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM terhadap pembayaran caj Perkhidmatan dalam pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).[7]
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sahizam Bin Musa yang berjudul "Kesanggupan Membayar Balik Pinjaman PTPTN Kajian Kes Di Universiti Malaysia Terengganu". Dalam skripsi ini beliau lebih memfokuskan permasalahan mahasiswa di Universiti Malaysia Terengganu berkaitan tentang permasalahan kesanggupan membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak PTPTN kepada mahasiswa tersebut.[8]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai berikut:

---

[6] Wan Fatimah Zahraa, "Analisis Pembiayaan PTPTN Berasaskan Ujrah" (Skripsi -- Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015).
[7] www.fp.utm.my

[8]Mohammad Sahizam, "Kesanggupan Membayar Balik Pinjaman PTPTN Kajian Kes di Universiti Malaysia Terengganu" (Skripsi- -Universiti Utara Malaysia, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Ujrah* di PTPTN.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching, Kota Sarawak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, diharap dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi antaranya:

1. Aspek Teoritis

   Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih baik untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam pengurusan Penerapan PTPTN dan kebijakan – kebijakan yang bisa dilaksanakan oleh pihak PTPTN yang bertanggung jawab menguruskan pinjaman kepada pelajar dan pihak yang perlu mengkaji semula status tambahan bayaran yang dikenakan supaya tidak membebankan pelajar dan tiada unsur riba.

2. Aspek Praktis

   Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila ada masalah yang berkaitan khusus dengan badan pertubuhan atau mana-mana organisasi yang memberikan pinjaman pelajaran kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa dan mengenakan tambahan bayaran, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan berkaitan PTPTN.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

Hukum Islam: Ketentuan perintah Allah Swt yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist dan hasil ijtihad para Ulama' yang membahas tentang *ujrah*.[9]

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN): Pinjaman Pendidikan PTPTN diwujudkan bagi tujuan untuk memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan. Pinjaman pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Sekali gus, membuka lebih

[9]Siti Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak peluang kepada semua golongan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Pembiayaan *Ujrah*: Adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan oleh pihak PTPTN kepada nasabah yaitu jasa meminjamkan uang untuk melanjutkan pelajaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan dan empiris yaitu lapangan yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid dan data yang valid pasti reliable dan obyektif.[10]

Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[11] Dan dari pendekatan ini akan menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang diamati.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni sumber primer dan sekunder yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari : (a) proses awal mula

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &*D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
[11]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan *ujrah* dalam PTPTN (b) Alasan PTPTN di kota Sarawak menerapkan biaya sebesar 1% dalam setiap peminjaman.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.[12] Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan lain-lain.[13] Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Yang meliputi, 3 pihak PTPTN, 1 pihak jabatan agama Islam dan 5 nasabah.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada pihak ketiga dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.[14] Dalam penelitian ini sumber kepustakaan diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan akad *ujrah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data seperti informan dan lain-lain serta data

[12]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), 107.
[13]Ibid., 15.
[14]Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder yang merupakan data yang sudah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Observasi

Observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.[19]

Observasi dilakukan di tempat-tempat yang dijadikan obyek penelitian. Bukti observasi sering kali bermanfaat memberikan informasi tambahan tetang topik yang diteliti. Observasi dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara *(interview)* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang diberikan atas jawaban itu.[15] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur ketat yang lentur dan terbuka dengan pertanyaan yang semakin

[15] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi.[16] Dimana yang diwawancarai adalah sumber data.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang.[17]

Studi dokumentasi ini dimaksudkan sebagai data pelengkap dalam mencari data yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara selain itu dokumentasi akan dilakukan dengan pencarian data yang terkait dengan penerapan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching Kota Sarawak yang berguna sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang

[16] Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2013), 27.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[18] Tentang penerapan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching Kota Sarawak dan akan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dari umum ke khusus tentang penerapan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Bandar Kuching Kota Sarawak.

I. Sitematika Pembatasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan membahas mengenai Konsep *ujrah* dan Fatwa Kebangsaan Malaysia. Bab ini membahas tentang pengertian, dasar, syarat-syarat *ujrah*, macam-macam *ujrah*, gugurnya *ujrah* dan juga Fatwa Kebangsaan Malayisa yang digunakan.

[18]Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, Penerapan Pembiayaan *Ujrah* di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional(PTPTN) Kuching,Sarawak.Data lapangan yang memaparkan gambaran umum profil PTPTN di Kuching,Sarawak, profil nasabah, latar belakang peminjam, latar belakang *Ujrah* yang ditetapakan di PTPTN, Akad *ujrah* dan aplikasi akad tersebut.

Bab Keempat, Mengenai tinjauan hukum islam terhadap penerapan *ujrah* PTPTN di Kuching Sarawak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan *Ujrah* di PTPTN.

Bab Kelima, Kesimpulan Merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AL-UJRAH (UPAH KERJA) DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA

A. *Ujrah* Dalam Islam

1. Pengertian *al-Ujrah* (upah kerja)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti iwadhu (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat sesuatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah"atau "ganti"atau imbalan, karena itu *lafadz ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu aktifitas.[1]

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *ujrah* atau upah sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah menurut Hambali adalah sah untuk memberikan langsung atau menangguh upah. Ataupun memberikan sebagian atau menangguhkan yang sebagainya lagi sesuai dengan

[1] Helmi Karim, *Fiqh muamalah,* (Jakarta: Grafindo Persada II 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepakatan bersama. Jika sebelumnya ada kesepakatan tertentu maka wajib bagi pemakai jasa untuk memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan yang tealh disepakati.

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa "Upah mengajar al-Quran dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis al-Quran dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya.

Terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:[2]

a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kirạ*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kirą* menurut istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

c. Ulama Syafĩiyah berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syarą dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syarą disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

2. **Dasar *Ujrah***

Dasar hukum *ijārah* adalah Al-Quran Sunnah dan ijtima' ulama. Adapun beberapa sumber hukum tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Quran:

1. Firman Allah SWT. Dalam Surat At- Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّ جْدِ كُمْ وَلاَتُضَارُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ
وَاِنْ كُنَّ اُولاَتِ حَمَلٍ فَاَ نْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَ
تُوْ هُنَّ اُجْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْ ابَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَا سَرْ تُمْ فَسَتُرْ ضِعُ لَهُ اُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusukan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya: dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya".[3]

Wajib atas seorang ayah yang menyusukan anaknya kepada orang lain menyerahkan upah persusuan dengan yang sepatutnya, yaitu tanpa menunda-nunda dan menguranginya. Sebagaimana ayat,"apabila kamu memberikan pembayaran meurut yang patut".

Bahwa tidaklah wajib bagi seseorang yang memperkerjakan seperti orang yang meminta agar anaknya disusui kecuali apa yang telah menjadi kesepakatan dalam akad pekerjaan, sesuai ayat tersebut diatas. Maka apabila orang yang dipekerjakan meminta kepadanya untuk menambah dari upah yang telah disepakati maka tidak wajib baginya untuk memenuhinya walaupun kebutuhan bertambah.

2. Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Kahfi ayat 77.

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا

Artinya: "Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding yang hampir roboh, maka khidr menegakkan dinding itu, Musa berkata: "jikalau kamu mahu, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."[4]

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), 557.
[4] Ibid.,293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Firman Allah SWT. Dalam Surat At-Tin ayat 6:

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh,maka bagi mereka pahala (upah) yang tiada putus – putusnya".[5]

4. Firman Allah SWT. Dalam Surat Al- Imran ayat 57:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan- amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang orang yang lalai.[6]

5. Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Qasas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ,wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. Dia (Syu'aib) berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik.[7]

[5] Ibid.,597.
[6] Ibid.,57.
[7] Ibid., 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Firman Allah SWT. Dalam Surat Az- Zukhruf ayat 32:[8]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

7. Firman Allah SWT. Dalam Surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan."[9]

b. As-Sunnah

1) Hadis Riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[8] Ibid., 491.
[9] Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda : “berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering ”.[10]

Dari hadis di atas Rasulullah saw menyampaikan bahwa kita sebaiknya memberikan upah kepada pekerja sebelum keringat pekerja itu kering, maksudnya adalah lebih baik untuk seseorang untuk menyegerakan memberi upah untuk pekerjanya karena upah tersebut sangat diperlukan oleh pekerja tersebut.

2) Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan.[11]

[10] Ibnu Majah, ”Sunan Ibn Majah”, Hadith no. 2434, Kitab: al-Ahkam, Bab: Ajr al-Ajr’ dalam Mausu’ah al-Hadith ash-Sharif, edisi ke-2 (ttp,: Global Islamic Software Company, 1991-1997).
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. Rukun *Ujrah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafaz akad memeunuhi syarat:[12]

1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatya).
5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayar jelas.
7) Wujud upah harus jelas.
8) Waktu pembayaran upah harus jelas.

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna yaitu cacat, maka suatu perjanjian tidak sah atau batal. Menurut Jumhur Ulama'ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:[13]

a) Aqid atau pelaku akad (*al-Mu'jir dan al-musta'jir*)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan sesuatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

b) Barang yang bermanfaat (*Ma'qud alaih)*

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

(1) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.

[13] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaanya.

(3) Manfaat barang adalah perkara yang boleh menurut syara'dan bukan yang diharamkan.

(4) Barang kekal zat-nya

c) Barang yang diakadkan

Wujudnya barang yang akan diakadkan.

d) Ijab dan Qabul (*Sighat)*

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan sesuatu ketentuan:[14]

(1)Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.

(2)Antara ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

(3)Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian.

b. Syarat- Syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ujrah* sebagai berikut:[15]

---

[14] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

[15] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab* (*Al- Fiqh' Alal Madzah ibil Arba;ah),* juz IV, (Semarang: CV. As- Syifa', 1994), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ujrah* harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2) Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat. Nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur ketidakpastian (*jihalah)*.
3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4) *Ujrah* perjanjian sewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

Para Ulama membolehkan upah sebagai imbalan dari pekerjaanya, karena hal itu termasuk hak dari seseorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat-syarat upah yaitu:[16]

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seseorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.

Syarat-syarat pokok dalam al-Quran dan as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan muajir harus

[16] Ibid.,181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

4. Macam-Macam *Ujrah*

Terdapat bebrapa macam upah yaitu:[17]

a. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaanya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkatan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi "Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya pahala". Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:[18]

1) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa,jenis tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.

2) Upah sewa-menyewa kenderaan

Boleh menyewakan kenderaan, baik hewan atau kenderaan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempoh waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.

3) Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain iu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

4) Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupkannya dengan bantuan alat. Usaha berbekam hukumnya boleh.[19]

5) Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya, hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh , yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena

[19] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

6) Setiap akad yang halal sesuai syariat.
7) Akad yang mengandungi manfaat.
8) Akad yang memenuhi syarat dan rukun.
9) Akad yang berdasarkan suka sama suka.

b. Upah Yang Tidak Diperbolehkan

1) Upah atas praktek Ibadah[20]

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktik di atas. Para ahli fiqih

[20] Hamzah Ya, qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,*(Bandung: Diponogoro,1984), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram.

2) Akad yang melanggar syariat Islam.
3) Akad *Ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat.
4) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain.
5) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun.

5. **Berakhirnya *Ujrah***

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Ujrah,* yaitu:[21]

a. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
b. Pembatalan akad.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghisupan dibagian mana sahaja di dalam Negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tiada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari suatu daerah ke daerah yang lain untuk mencari upah yang lebih tinggi.

[21] Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang dianjurkan oleh Islam adalah menentukan standart upah diseluruh Negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang pekerjaan dan keseluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi sesuatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dimana- mana.[22]

B. Fatwa Kebangsaan Malaysia

1. Latar Belakang Fatwa Kebangsaan Malaysia

Fatwa kebangsaan Malaysia adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum di setiap negeri (provinsi) di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Undang-undang Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di Malaysia, di mana di dalam perkara (pasal) 3 ayat (1) Perlembagaan Persekutuan disebutkan bahwa, “Islam ialah agama

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang di Negara Malaysia. [23]

Dikenal pertama kalinya dengan nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan, yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian ditukar menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada hari Malaysia, yaitu tanggal 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan mengakui Islam sebagai agama resmi di Malaysia dan mengakui sultan atau raja sebagai ketua agama di negeri (provinsi) di seluruh Malaysia. Bagi negeri yang tidak mempunyai sultan atau raja, maka Yang di-Pertuan Agung menjadi ketua agama untuk mereka .

Untuk melancarkan urusan berkaitan agama Islam, setiap negeri mendirikan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam masing-masing. Fungsi utama Majlis Agama Islam adalah memberi nasihat kepada raja atau sultan berkenaan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Islam. Sedangkan Jabatan Agama Islam menjalankan tugas dan gerak kerja yang telah digariskan oleh Majlis Agama Islam. Dengan kata lain, Jabatan Agama Islam adalah

[23] Ustaz Haji Khalidi, *Wawancara,* Jabatan Agama Islam Sarawak, 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana setiap dasar yang dibuat oleh Majlis Agama Islam. Pada tanggal 17 Oktober 1968, Majlis Raja-Raja Malaysia dalam persidangannya ke-81 telah mencapai kata sepakat untuk mendirikan satu badan untuk menyelaraskan pentadbiran (pengelolaan) agama Islam di seluruh Malaysia. [24]

Badan ini berdiri dengan resmi pada tanggal 1 Juli 1969 dengan nama Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat. Setelah Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia, badan ini kemudian dinamakan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau nama singkatnya MKI tepat pada tanggal 17 Juni 1971. Di dalam Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI).[25]

Terdapat satu badan yang dikenal dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Jawatankuasa ini didirikan di awal tahun 1970. Jawatankuasa ini merupakan badan yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa di peringkat nasional. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, lebih dikenal dengan nama Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia (JFK) di kalangan

[24] Mohamad bin Saari, *Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2012), 3.
[25] www.islam.gov.my , 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Tujuan utama pembentukan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) adalah untuk mengelakkan berlakunya perbedaan atau setidaknya dapat mengurangkan perbedaan dan perselisihan dalam soal pentadbiran (pengelolaan) agama Islam antara satu negeri dengan negeri yang lain, dengan arti kata lain, objektif MKI adalah untuk melihat penyatuan yang lebih kukuh dalam pentadbiran agama Islam di Malaysia.

2. Visi, Misi dan Metode Istinbat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI)

Visi MKI adalah peneraju kecemerlangan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia menjelang tahun 2020. Misi MKI adalah memacu transformasi pengurusan hal ehwal Islam untuk meningkatkan kemaslahatan negara melalui pemerkasaan agensi Islam secara inovatif dan strategik.

Adapun struktur kepengurusan Jawatankuasa Fatwa, terdiri dari seorang pengerusi, para mufti dari negeri yang mengambil bagian atau seorang yang mewakili negeri dalam perkara agama Islam, sembilan orang ahli yang beragama Islam yang terdiri dari alim ulama dan kalangan profesional muslim yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, dan seorang ahli yang beragama Islam dari sektor kehakiman dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang- undang yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Semua ahli yang dilantik dalam JFK ini tidak boleh melewati 3 tahun untuk setiap lantikan, kecuali pengerusi dan para mufti.[26]

Di dalam Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI), disebutkan bahwa tugas MKI adalah sebagai berikut ;[27]

a. Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujukkan kepada Majlis oleh Majlis Raja- Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Negeri atau seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran.
b. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran Agama Islam dan pelajaran Agama Islam, dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran.

Dari penjelasan di atas, jelas menunjukkan bahwa tugas utama MKI adalah untuk memberi nasihat kepada segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang menjadi agama resmi di Malaysia. Adapun mengenai persoalan fatwa, MKI telah

[26] Ustaz Haji Khalidi, *Wawancara,* Jabatan Agama Islam Sarawak, 12 Agustus 2018.
[27] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Putrajaya: JAKIM, 2013), Perkara 7 (a) dan 7 (b), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meletakkannya di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Fatwa. Tugas Jawatankuasa Fatwa ini disebutkan di dalam perkara 14 Peraturan MKI sebagai berikut :

Tugas Jawatan kuasa Fatwa itu ialah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan Agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Jawatankuasa itu hendaklah mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis yang akan menghantarkannya bersama dengan pengesyoran-pengesyorannya kepada Majlis Raja-Raja .

Ini bermakna, dalam persoalan mengeluarkan fatwa, para ahli yang ada dalam JFK akan melakukan musyawarah, kemudian, keputusan yang dicapai dalam musyawarah itu akan diserahkan kepada MKI, yang kemudiannya akan dihantar ke Majlis Raja-Raja untuk diteliti dan mendapatkan persetujuan para raja sebelum sesuatu fatwa itu dapat disahkan.

Proses pengeluaran fatwa di Malaysia hanya akan berlaku apabila Mesyuarat Majlis Raja-Raja menitahkan agar Jawatankuasa Fatwa MKI memberikan pandangan atau fatwa terhadap sesuatu isu yang timbul dalam masyarakat di Malaysia. Setiap isu yang timbul akan dibuat satu kertas kerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudiannya dibahas dalam muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI.[28]

Adapun mengenai metode istinbaṭ yang digunakan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, mereka dikehendaki mengikut sumber-sumber berikut: [29]

a. Nas-nas mengikut susunan keutamaannya: Al-Quran, as-sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istiṣḥab*, *istihsan, al-maṣaliḥ al-mursalah, uruf, al- adat al-muḥakkamah, syar'un man qablana, sad az-zara'i,* dan *amal ahli al-Madinah.*

b. Pendapat-pendapat sahabat, *tabi'in*, imam-imam mazhab dan fuqaha' dengan mengadakan penelitian terhadap dalil dan *wajh istidlalnya.*

3. Latar Belakang Terbitnya Fatwa Pembiayaan *Ujrah* di PTPTN.

Setelah mendapat banyak runggutan dari ramai pihak, pada tahun 2008,PTPTN telah menggeluarkan kebijakan baru yaitu pembiayaan *ujrah* dan menggadakan Musyawarah bersama Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia berkaitan hal tersebut dan meminta Majlis Fatwa Kebangsaan untuk menimbangkan dan menggeluarkan fatwa. Setelah itu Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia melakukan

[28] Ibid.,3.
[29] www.jais.Sarawak.gov.my, 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008

4. Isi Fatwa perlaksanaan Pembiayaan Pendidikan PTPTN .

Di sini jelaslah bahwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia disahkan oleh Negara Malaysia. Setiap fatwa yang dikeluarkan wajiblah diikuti oleh rakyat Malaysia dan menjadi sumber utama rakyat Malaysia.

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008 telah membincangkan kajian perlaksanaan Pembiayaan Pendidikan PTPTN berdasarkan kontrak *Ju'alah.*

Muzakarah telah memutuskan bahwa:

1) Bersetuju dengan caj perkhidmatan yang dikenakan PTTPTN kepada pelajar atas konsep upah (*Ujrah)* dengan kadar yang munasabah dan tidak membebankan pelajar.
2) Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (*Ta'widh)* kepada para pelajar yang telah mendapat pekerjaan tetap dan berkemampuan dari aspek keuangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek keuangan tidak dikenakan pampasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pihak PTPTN hendaklah memberikan rebat (*ibra)* kepada pelajar yang berjaya melangsaikan pembiayaan lebih awal daripada tamat tempoh perjanjian Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini diaplikasikan kepada semua kategori pelajar disemua peringkat pengajian dan terpakai kepada seluruh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa[30]

[30] www.ptptn.gov.my 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN PEMBIAYAAN UJRAH DI PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) DI KOTA KUCHING,SARAWAK,MALAYSIA.

A. Profil Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

1. Sejarah Berdirinya PTPTN

Perbadanan Tabung Pendidikan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau singkatannya (PTPTN) telah didirikan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mulai berkuasa pada 1 Juli 1997 dan beroperasi pada 1 Nopember 1997 di bangunan WISMA Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur. Berdirinya PTPTN barawal dengan adanya pengumuman rencana jangka panjang 2020 pada tahun 1991 oleh Tun Dr.Mahathir.[1]

Pada awalnya, Jabatan Pentadbiran Awam (JPA) merupakan badan utama yang bertangggungjawab untuk menguruskan pinjaman serta beasiswa terutama kepada sejumlah pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Oleh karena pihak JPA tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, PTPTN

[1] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didirikan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 1997 untuk mengambil alih tugas JPA sebagai pengurus utama pinjaman dana.

Seperti yang diketahui kebanyakan dana PTPTN dan JPA adalah dari cukai pendapatan dan cukai lain yang diperoleh dari rakyat oleh pemerintah. Kini PTPTN menguruskan pinjaman dan pembayaran semula hutang pelajar selepas tamat pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institit Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Golongan pelajar terutama dari kelas menengah dan kelas pekerja yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka dengan ijazah dari IPTA dan IPTS tiada pilihan lain selain mengharapkan pinjaman PTPTN untuk membiayai kos pendidikan yang semakin hari semakin meningkat.[2]

Selain itu PTPTN juga menyediakan skim simpanan pendidikan yang dikenal dengan sebutan "Skim Simpanan Pendidikan Nasional" (SSPN) yang merupakan suatu bentuk produk tambahan, yang membolehkan pendeposit menyimpan uang bagi tujuan pendidikan anak-anak pada masa depan. Dalam tersebut PTPTN turut melaksakan fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh undang-undang hukum bertulis di Malaysia.

[2] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan PTPTN didirikan adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh PTPTN sudah efisien disediakan untuk para pelajar-pelajar yang layak mengikuti pendidikan di Institusi Tinggi (IPT) selaras dengan keinginan kerajaan bahwa tidak ada pelajar-pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab –sebab keuangan.

Pembiayaan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuhnya atau sebagian biaya pengajian dan juga biaya kehidupan di sepanjang tempoh pengajian mereka di IPT.[3]

2. Visi, Misi dan Moto

Visi PTPTN adalah menjadi institusi peneraju dalam pengurusan pembiayaan pengajian tinggi dan Misinya adalah untuk mengurus sumber keuangan dengan tujuan memberikan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar di Institusi Pengajian Tinggi.

Manakala, moto PTPTN adalah Dana Pendidikan Pemangkin Pembangunan Negara.

3. Struktur Organisasi PTPTN Kota Kuching Sarawak.[4]

[3] www.ptptn.gov.my, 12 Agustus 2018.
[4] Mohammad Ahmad, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CARTA PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

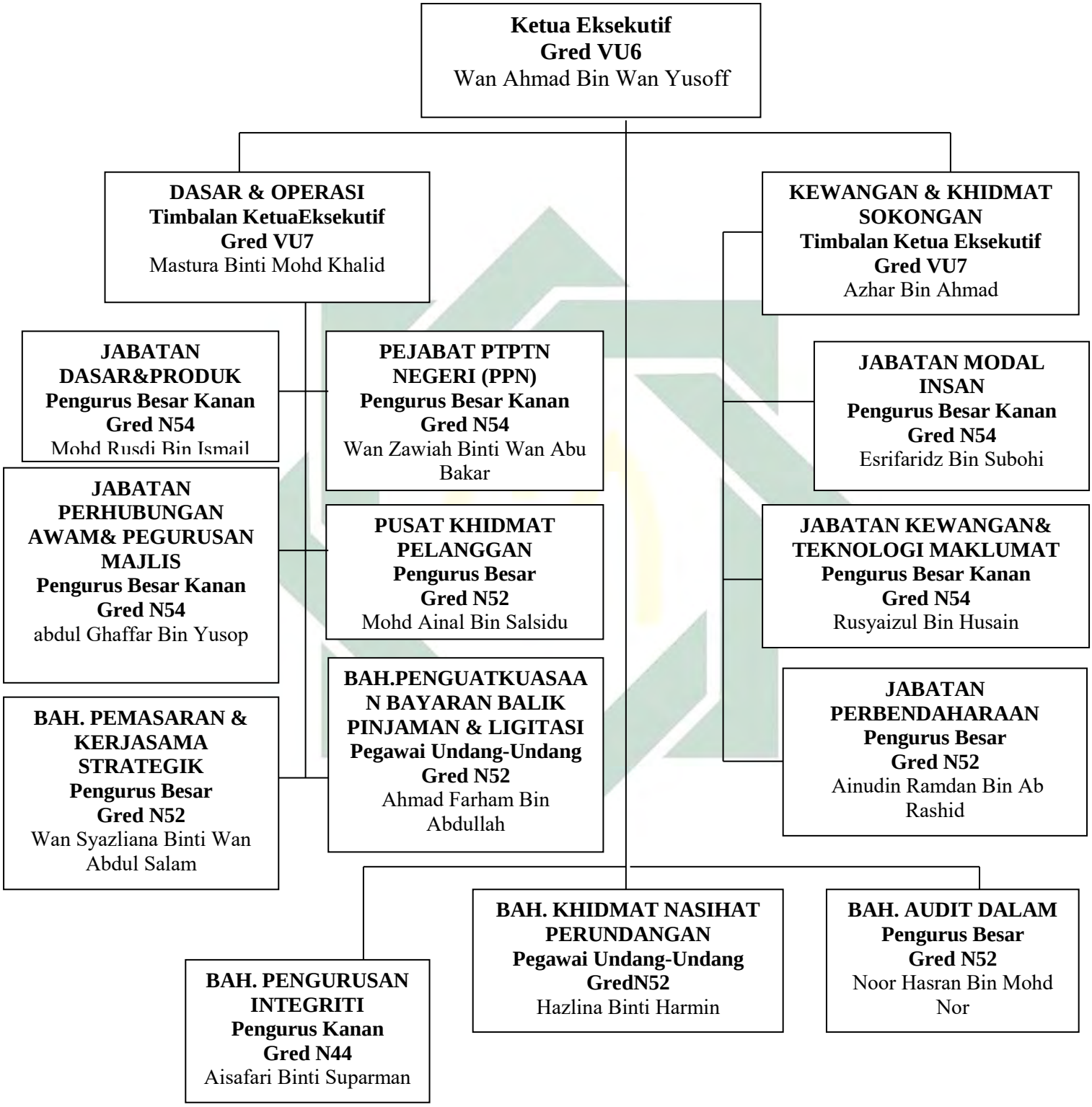

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PROFIL NASABAH

1. Nama Dayang Mazni binti Mohsen, Asal Tebekang Sarawak. Berumur 23 tahun. Penuntut Universiti Teknologi Mara dalam jurusan engineer. Mulai mendapat pinjaman dari PTPTN pada tahun 2014 sehingga selesai diploma atau S1 pada tahun 2016. Nasabah mendapat pinjaman berjumlah RM15,000.00 untuk melanjutkan S1 dari PTPTN dan menggatakan beliau sudah mulai membayar dari tahun 2016 dan lancar sehingga sekarang.[5]
2. Nama Nasabah adalah Syahidatul Hajar dan Syarifah Sakinah,berumur 22 Tahun. Keduanya Berasal dari Kota Kuching Sarawak dan berkuliah di Politeknik Mukah, Sarawak dalam jurusan Human Resources. Mulai membayar pada awal tahun 2018 setelah selesai kuliah pada tahun 2017.[6]
3. Nama Siti Aisyah binti Mahdi Yusuf. berumur 25 tahun. Alumni IPTS Sunway Kuching Sarawak. Berasal dari Kuala Lumpur. Barusan mendapat pekerjaan di Sarawak di dalam bidang engineer sekitar 2 tahun selepas tamat kuliah di IPTS Sunway Kuching Sarawak. Mulai mendapat pinjaman PTPTN pada tahun 2011 dan mengakhiri kuliah pada tahun 2015 dan mulai membayar pinjaman pada tahun 2016 sehingga sekarang.[7]

---

[5] Dayang Mazni, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 2 Juli 2018.
[6] Syaidatul Hajar, Syarifah Syakinah, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 2 Juli 2018.
[7] Siti Aisyah, *Wawancara*, Kuching Sarawak, 3 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nama siti Balqish Sarimah Husna Khairiah Majnun Binti Ahmad Khairul Samad. Alumni Universiti Malaysia dalam jurusan Kedoktoran. Berumur 32 tahun. Mendapat pinjaman PTPTN mulai awal pengajian sehingga selesai pengajian sebanyak RM 50.000. Setelah selesai kuliah, beliau berasa kesulitan untuk membayar pinjaman karena beliau barusan kehilangan seluruh ahli keluarga dalam kecelakaan mobil dan membuat rayuan untuk penangguhan bayaran pinjaman selama setahun selepas 12 bulan selesai kuliah dan berarti beliau harus mulai membayar pinjaman 2 tahun setelah selesai kuliah. Dalam tempoh waktu penangguhan bayaran semula pinjaman,beliau berjaya mendapatkan pekerjaan dan langsung mulai membayar pinjamannya sebelum waktu penangguhan bayaran berakhir dan lancar membayar sehingga sekarang.[8]
5. Nama nasabah Nurul Asyiqah binti Drahman dan Mohd Syafiq Kyle merupakan penuntut Universiti Teknologi Mara dan kedua-duanya dalam proses kuliah S2. Berumur 23 tahun dan berasal dari Kota Kuching, Sarawak. Mulai mendapat pinjaman dari PTPTN pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2017 dan langsung mulai membayar pinjaman

[8] Siti Balqish Sarimah, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 3 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mendapat pekerjaan pada tahun 2017 dan lancar membayar sehingga sekarang.[9]

C. LATAR BELAKANG UJRAH YANG DITETAPKAN DI PTPTN

Kelayakan pelajar untuk diberikan pinjaman adalah bergantung kepada tahap kemampuan keuangan keluarga dan mereka mestilah mengikuti program pendidikan sepenuh masa pada peringkat ijazah pertama dan diploma dimana-mana institut pengajian tinggi.

Setelah banyak sekali rungutan dan orang ramai merasakan terbeban dengan PTPTN dengan caj perkhidmatan yang sangat tinggi mulai dari 10% sehingga 3%. Pihak PTPTN telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu pembiayaan Ujrah yang hanya mengambil 1% bagi meringankan beban peminjam dan bersesuaian dengan hukum Islam. 1% itu adalah caj perkhidmatan yang dikenakan PTPTN kepada nasabah.[10]

Ujrah PTPTN didirikan pada 2008 selepas persidangan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal Ehwal Agama Islam

[9] Nurul Asyiqah, *Wawancara*, Kuching Sarawak, 3 Juli 2018.
[10] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008. Muzakarah telah memutuskan bahwa:[11]

1. Bersetuju dengan caj perkhidmatan yang dikenakan PTTPTN kepada pelajar atas konsep upah (*Ujrah)* dengan kadar yang munasabah dan tidak membebankan pelajar.
2. Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (*Ta'widh)* kepada para pelajar yang telah mendapat pekerjaan tetap dan berkemampuan dari aspek keuangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek keuangan tidak dikenakan pampasan.
3. Pihak PTPTN hendaklah memberikan rebat (*ibra)* kepada pelajar yang berjaya melunasi pinjaman lebih awal daripada jatuh tempo perjanjian.
4. Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini diaplikasikan kepada semua kategori pelajar disemua peringkat pengajian dan terpakai kepada seluruh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa.

[11] www.ptptn.gov.my , 11 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. AKAD UJRAH

Akad yang dilaksanakan di PTPTN adalah akad Ujrah, yaitu Upah yang dikenakan oleh pihak PTPTN kepada para nasabah Sebagai caj perkhidmatan. Caj perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak PTPTN kepada para nasabah adalah sebanyak 1%, di mana para nasabah harus membayarnya ketika membayar semula pinjaman pada PTPTN.[12]

Contoh akad ujrah dilaksanakan di PTPTN yang di wawancara oleh penulis adalah nasabah yang bernama Dayang Mazni binti Mohsen yang pernah berkuliah di Universiti Teknologi Mara mendapatkan pinjaman sebanyak RM 15.000 daripada pihak PTPTN. Ketika nasabah mendapatkan pinjaman dari PTPTN sebanyak RM 15.000, Maka nasabah mempunyai tanggungjawab untuk membayar semula pinjaman setelah kuliah seperti yang disepakati dengan pihak PTPTN adalah mula membayar cicilan setelah 12 bulan tamat kuliah besertakan dengan ujrahnya. Lalu PTPTN juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sehingga selesai yaitu pihak PTPTN haruslah memberikan setiap semester kepada nasabah uang cicilan daripada pinjaman sehingga genapnya jumlah pinjama yaitu RM 15.000. Dari tanggungjawab tersebut, pihak PTPTN dan

[12] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah masing-masing memiliki hak yaitu nasabah mendapatkan hak pinjaman dari PTPTN dan memperoleh hak dalam kemudahan mengembalikan pinjaman PTPTN yaitu membayar pinjaman secara cicilan sesuai tempoh waktu yang telah disepakati. PTPTN juga memiliki hak untuk mendapatkan uang pinjaman kembali dari nasabah dan ujrah yang telah disepakati yaitu 1%.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan ujrah 1% oleh PTPTN adalah kos pentadbiran, dimana pembayaran kos pentadbiran tersebut digunakan sebagai biaya untuk fotokopi dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pelunasan cicilan. Jika nasabah telat membayar atau menunda pembayaran, maka akan dikenakan ujrah sebesar sisa hutang yang masih tersisa.[13]

Transaksi ini dilakukan antara pihak PTPTN kepada para nasabah dengan memberikan jasa pinjaman keuangan untuk melanjutkan pelajaran sama ada di IPTA atau IPTS. Setelah para nasabah bersetuju dengan terma dan syarat yang ditentukan, para nasabah haruslah mengisi formulir pinjaman dan memenuhi segala terma dan syarat yang ditentukan oleh pihak PTPTN dan mentandatanganinya.[14]

---

[13] Dayang Mazni, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 2 Juli 2018.
[14] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan pinjaman di PTPTN, seseorang itu haruslah memenuhi syarat yang dikenakan oleh pihak PTPTN terlebih dahulu yaitu:

1. Maklumat Permohonan Kelayakan Permohonan Pembiayaan Pendidikan PTPTN

   Pelajar layak memohon pembiayaan pendidikan sekiranya memenuhi kelayakan berikut:[15]

   a. Warganegara Malaysia
   b. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon.
   c. Mendapat tawaran ke IPTA atau IPTS dan Politeknik dengan memnuhi syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
   d. Kursus yang diikuti oleh pelajar IPTA atau IPTS dan Politeknik mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi.
   e. Bagi pelajar yang IPTS, kursus yang diikuti mestilah mendapat Sijil Perakauan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan,
   f. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza daripada yang disyaratkan di perenggan (iv) dan (v),pengesahan bahwa kelayakan

[15] www.ptptn.gov.my, 2 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut setaraf dengan kelayakan yang disyaratkan hendaklah diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan,

g. Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu tahun,

h. Tiada penaja lain dan;

i. Mempunyai akaun SSPN-I sebelum membuat permohonan.

2. Dokumen Sokongan

Setiap permohonan mestilah dilampirkan bersama satu (1) salinan dokumen sokongan seperti berikut:[16]

a. Pembiayaan yang boleh dicetak di butang cetak maklumat di dalam portal rasmi PTPTN, permohonan *online* yang telah didaftarkan sebelum ini.

b. Salinan Kad Pengenalan Penerima Biaya. Salinan fotokopi muka hadapan dan belakang kad pengenalan tersebut perlu dilakukan pada muka surat yang sama.

c. Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau SPMV. Slip transkrip keputusan peperiksaan SPM atau SPMV hanya sah untuk digunakan sekiranya tidak melebihi tempoh dua tahun dari tempoh peperiksaan diambil.

[16] www.ptptn.gov.my, 2 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT. Surat tawaran yang diperolehi melalui cetakan internet atau portal IPT.
e. Salinan Buku Akaun (muka surat yang tercatat nombor akaun) atau slip deposit bank atau pengesahan nombor akaun persendirian mengikuti bank yang telah ditetapkan oleh IPT. Dokumen ini hanya perlu disediakan sekiranya berlaku kesilapan nombor akaun pada dokumen perjanjian penerima biaya.
f. Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. Contohnya, STPM atau Diploma atau Matrikulasi atau Ijazah atau Sarjana.
g. Salinan slip gaji atau borang cukai pendapatan individu atau kad pesara atau penyata pencen atau surat pengesahan pendapatan atau surat pengesahan tidak bekerja – Penjaga Pertama.
h. Salinan slip gaji atau borang cukai pendapatan individu atau kad pesara atau penyata pencen atau surat pengesahan pendapatan atau surat pengesahan tidak bekerja – Penjaga kedua.
i. Salinan slip gaji atau salinan borang cukai pendapatan individu atau surat pengesahan pendapatan atau surat pengesahan tidak bekerja – pasangan penerima biaya. (sekiranya penerima biaya telah berkahwin).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Surat pengesahan atau surat akuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pusat Zakat sekiranya penerima bantuan bulanan dari Agensi berkenaan – Penerima biaya atau ibubapakandung atau penjaga.

k. Surat pengesahan pengalaman kerja daripada majikan. (bagi penerima biaya yang menggunakan pengalaman kerja sebagai salah satu syarat kelayakan masuk).

Bagi pelajar yang mengemukakan permohonan pada semester 2 dan ke atas, tambahan dokumen sokongan berikut diperlukan:[17]

1) Surat pengesahan masih belajar dari IPT

2) Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya.

3. Tempoh mula bayaran kembali pinjaman adalah:[18]

a. peminjam hendaklah membuat bayaran kembali pinjaman selepas 12 bulan tamat pengajian tanpa perlu menunggu notis bayaran kembali daripada PTPTN.

b. Kos upah (Ujrah) secara bulanan akan dikenakan bermula bulan ke 13.

[17] Nazurah Ali, *Wawancara,* Bintulu Sarawak. 1 Juli 2018.
[18] www. ptptn. gov.my, 2 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peminjam yang membuat bayaran kembali lebih awal tidak akan dikenakan kos upah dalam tempoh 12 bulan tersebut.

d. Tempoh bayaran semula bagi peminjam yang membuat pertukaran Ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.

E. APLIKASI AKAD UJRAH

Setelah nasabah memenuhi terma dan syarat untuk mendapatkan pinjaman daripada PTPTN, nasabah haruslah mengisi formulir permohonan *online* dan mengirim ke PTPTN. Setelah itu, pihak PTPTN akan menghubungi para nasabah minimum 2 minggu untuk memberikan kabar berita terhadap permohonan pinjaman. Jika para nasabah layak diberikan pinjaman oleh PTPTN, pihak PTPTN akan menghubungi untuk bertemu dengan para nasabah dengan membawa sekalian semua salinan dokumen sokongan seperti di terma dan syarat untuk disemak oleh pihak PTPTN. [19]

Setelah dua minggu kemudian pihak PTPTN akan menghubungi semula para nasabah untuk mengkomfirmasikan uang yang sudah dimasukkan ke akun para nasabah. Setelah para nasabah selesai pengajian, para nasabah bertanggungjawab untuk membayar semula jumlah pinjaman PTPTN yang

[19] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan kepadanya termasuk kos-kos pentadbiran dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran pinjaman. Terdapat beberapa cara yang mudah yang disediakan oleh PTPTN untuk membayar semula pinjaman selain dari membuat bayaran dikaunter PTPTN, yaitu bisa membayar di Bank Islam, Bank Rakyat, Pos Malaysia, CIMB Bank, Bank Simpanan Nasional dan juga bayaran semula pinjaman melalui potongan gaji nasabah.[20]

Pihak PTPTN berhak mengingatkan para nasabah untuk membayar semula pinjaman PTPTN dan berhak untuk blokir daripada keluar negeri nama para nasabah yang tidak pernah membayar dan sering menunda bayar.[21] Oleh karena itu, pihak PTPTN menghadapi masalah kerugian karena keterlambatan para nasabah membayar pinjaman.

Setelah melakukan akad dengan pihak PTPTN sehingga selesai mendapatkan pinjaman, setelah kuliah nasabah berkewajiban mulai cicilan membayar semula pinjaman kepada pihak PTPTN dalam tempoh waktu yang ditetapkan di terma dan syarat di akad:

Tempoh mula bayaran kembali pinjaman adalah:[22]

---

[20] Nazurah Ali, *Wawancara,* Bintulu Sarawak, 1 Juli 2018.
[21] Mohammad Yusri, *Wawancara,* Pejabat ptptn Sarawak, 28 Juni 2018.
[22] www. ptptn. gov.my, 2 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. peminjam hendaklah membuat bayaran kembali pinjaman selepas 12 bulan tamat pengajian tanpa perlu menunggu notis bayaran kembali daripada PTPTN.
5. Kos upah (Ujrah) secara bulanan akan dikenakan bermula bulan ke 13.
6. Peminjam yang membuat bayaran kembali lebih awal tidak akan dikenakan kos upah dalam tempoh 12 bulan tersebut.
7. Tempoh bayaran semula bagi peminjam yang membuat pertukaran Ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.

Tetapi nasabah yang diwawancara penulis yaitu Dayang Mazni menggatakan bahwa 5 bulan setelah selesai kuliah, beliau telah menerima surat dari PTPTN untuk mulai membayar cicilan pinjaman. Oleh karena waktu itu nasabah belum mempunyai pekerjaan, cicilan pinjaman mulai dibayar oleh orang tua nasabah. Oleh karena itu, sebenarnya nasabah berhak mendapatkan tempoh 12 bulan mulai membayar cicilan pinjaman setelah kuliah seperti yang janjikan oleh PTPTN.

Setelah melaksanakan tanggungjawab kepada nasabah yaitu memberikan pinjaman sehingga selesai, PTPTN telah mendapatkan haknya dengan bayaran semula dari nasabah dan juga ujrahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus yang diwawancara penulis adalah nasabah yang bernama Dayang Mazni binti Mohsen yang pernah kuliah di Universiti Teknologi Mara dalam jurusan engineer. Beliau mendapat pinjaman daripada PTPTN sebanyak RM 15.000 (jika dirupiahkan sebesar Rp 45.000.00) untuk menyelesaikan S1. Setiap semester PTPTN memberikan kepada nasabah sebanyak RM 2.500 atau jika di rupiahkan menjadi 7.500.000 daripada jumlah pinjaman yang sebenar yaitu RM 15.000 (Rp 45.000.000) dengan cara transfer ke rekening nasabah hingga tempoh perjanjian berakhir. Namun, setelah 5 bulan tamat perkuliahan, Dayang Mazni menerima surat dari PTPTN untuk mulai membayar cicilan. Padahal seharusnya dalam syarat yang telah diberikan oleh PTPTN untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan dibayar setelah 12 bulan nasabah lulus dari perkuliahan. Namun, dalam praktiknya sebelum 12 bulan nasabah lulus kuliah, lebih tepatnya setelah 5 bulan nasabah lulus kuliah PTPTN memberikan surat peringatan kepada nasabah agar nasabah segera melunasi pinjaman yang telah diberikan. [23]

Oleh karena nasabah masih belum mempunyai pekerjaan, maka yang mulai membayar cicilan adalah orang tua nasabah, yaitu ayah nasabah. Dimana cicilan pokok yang harus dibayar sebesar RM 125.00 (Rp 375.000).

[23] Dayang Mazni, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam setiap cicilan PTPTN mensyaratkan nasabah harus juga menyertakan dengan ujrahnya sebesar 1% dan jika di RM-kan sebesar RM 55.00 (Rp 165.000). Jadi, setiap cicilan yang harus dibayar oleh nasabah untuk setiap bulannya sebesar RM 125.00 (Rp 375.000) + RM 55.00 (Rp 165.00) = RM 180.00 (Rp 540.000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA TERHADAP PENERAPAN UJRAH DI PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL(PTPTN) DI KOTA KUCHING SARAWAK.

A. Aplikasi Akad *Ujrah* di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di Kota Kuching,Sarawak.

Isi akad *Ujrah* di PTPTN adalah kos pentadbiran yang dikenakan oleh PTPTN kepada para peminjam. Para nasabah wajib membayar semula pinjaman bersama kos pentadbiran yang telah ditetapkan oleh PTPTN yaitu sebanyak 1%.[1]

Para Fuqaha berpendapat bahwa dalam hukum Islam adalah dilarang keras meminjam uang dengan sebarang penambahan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

[1] Ustaz Haji Khalidi , *Wawancara* , Jabatan Agama Islam Sarawak 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita meminjam sama ada untuk pinjaman peribadi atau tujuan komersil, kita wajib mengembalikan uang itu sahaja dan tiada penambahan satu sen pun. Pinjaman PTPTN merupakan satu kontrak diantara mahasiswa dengan pihak PTPTN yang bertanggungjawab menyediakan bantuan keuangan atau pinjaman bagi mahasiswa yang layak. Maka jelaslah disini adalah kontrak yang berlaku antara pelajar dan pihak PTPTN adalah kontrak hutang. Tujuan ujrah dilaksanakan adalah untuk membantu para peminjam membayar pinjaman tanpa beban yang berat yaitu 1% berbanding sebelumnya,konvensional sebanyak 3% dan mengikuti hukum Islam dan telah dipersetujui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia.

Meskipun secara perkiraan 1% ini terlihat murah dan baik, serta telah disahkan oleh Jawatankuasa Fatwa Malaysia, cara pengiraan ini tetap tidak berjaya menembusi piawaian hukum yang diputuskan oleh para ulama antara bangsa. Ini adalah karena cara pengiraanya masih terdapat yang sama dengan cara pengiraan riba sebelum ini yaitu pada sandaran caj upah. Dahulu pembiayaan konvensional disandarkan kepada jumlah pinjaman, dalam konsep ujrah juga disandarkan kepada jumlah pinjaman.[2]

Dalam hukum Islam, pemberi pinjaman sama ada individu, institusi kewangan Swasta atau kerajaan, Tidak Boleh mengenakan sebarang penambahan keuangan kepada peminjam khususnya dari jenis peratusan yang

[2] Ustaz Haji Khalidi , *wawancara* , Jabatan Agama Islam Sarawak 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandarkan kepada jumlah pemberian pinjaman. Berubah dengan berubahnya jumlah pemberian pinjam.[3]

Namun cara kiraan yang diguna pakai oleh PTPTN "*Ujrah*" yang masih disandarkan kepada jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan. Selain atas dasar kefahaman nas, para ulama antara bangsa melarangnya untuk menggunakan penambahan upah ini menjadi helah kepada riba (helah ribawiyah) yang asalnya caj tambah kepada pinjaman karena tempoh (*Time value of money).* Karena dari sudut konsep dan jurus pandangan ekonomi, kedua-dua jenis caj riba dan upah itu adalah sama. Jalan keluar yang paling kukuh adalah tidak menjadikan jumlah pinjaman sebagai sandaran untuk mengira upah.

Menurut keputusan Majlis Fiqh Antarabangsa dan lain-lain majlis syariah yang berautoriti tanpa kepentingan tertentu syarikat dan institusi keuangan diseluruh dunia, caj yang dibenarkan dikenakan kepada peminjam hanyalah kos sebenar yang lahir dari urusan pemberian pinjaman sahaja dan tiada kaitan dengan nilai pemberian pinjam.[4]

[3] www.e-fatwa.gov.my.
[4]Ustaz Haji Khalidi , *wawancara* , Jabatan Agama Islam Sarawak, 12 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah* Di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di Kota Kuching, Sarawak.

Banyak para pelajar yang merasakan terbebani dengan penambahan 1% yang dikenakan oleh PTPTN dan merasa pembiayaan Ujrah tidak banyak perbedaan dengan pembiayaan konvensional.[5] Para pelajar wajib membayar pinjaman PTPTN bersama kos pentadbiran selesai kuliah walaupun belum mendapat pekerjaan dan ini tidak sesuai dengan isi muzakarah Khas Jawatan kuasa Fatwa kebangsaan Malaysia terhadap *Ujrah* PTPTN yaitu"bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek keuangan tidak dikenakan pampasan".[6] Walaupun kos pentadbiran PTPTN 1% itu terlihat sedikit tetapi menurut hukum Islam setiap pinjaman yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah riba.

Sebagai contoh hitungan pembiayaan *ujrah* adalah nasabah meminjam sebanyak RM10.000. Jadi 1% akan dikenakan kepada RM 10.000, yaitu RM100. Kemudian ia akan dibagi kepada 12 bulan yaitu RM 8.30. Itulah jumlah kos pentadbiran yang akan diambil untuk jangka masa pinjaman nasabah. Sekiranya 20 Tahun (240 bulan) bersamaan RM 8.30 x

[5] Siti Aisyah, *wawancara,* Kuching, 3 Juli 2018.
[6] Dayang Mazni, *Wawancara,* Kuching Sarawak, 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

240 bulan = RM 1,992 (kos pentadbiran). Kadar ini akan sama walaupun jumlah prinsipal pinjaman nasabah telah berkurangan.[7]

Ini berbeda pula dengan kadar 3% yang dikenakan oleh pihak PTPTN sebelum ini dalam pembiayaan konvensional yaitu dimana 3% itu dikenakan pada jumlah prinsipal yang tinggal. Semakin rendah prinsipal nasabah, semakin sedikit jumlah kos pentadbiran yang dikenakan. Sebagai contoh nasabah meminjam sebanyak RM 10,000. Jadi 3% akan dikenakan pada baki jumlah yang pertama dan dibagi kepada 12 bulan. Sebagai contoh RM10.000 x 3% bahagi 12 bulan = RM 25 (bulan pertama). Keliatannya seperti tinggi tetapi, katakan nasabah telah membayar RM 5,025 sebelum bulan kedua. Maka kiraan untuk bulan kedua ialah RM 10,025 – RM 5,025 = RM 5,000. RM 5,000 x 3% bahagi 12 bulan = RM 12.50 (bulan kedua). Perbedaan pembayaran kos pentadbiran yang telah dinyatakan.

Secara ringkasnya, 1% *Ujrah* menggamalkan satu kali hitungan pada jumlah pinjaman pertama dan akan dikenakan pada keseluruhan jangka masa pinjaman. Jika kadar kos pentadbiran adalah RM 8, maka ia akan kekal selama 240 bulan. Sekiranya nasabah mengambil 3% maka ia dikenakan

[7] www.ptptn.gov.my pembiayaan kalkulator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada jumlah sisa pinjaman pada setiap bulan. Kos itu akan berkurangan seiring dengan jumlah pinjaman anda.[8]

Kesimpulannya, sekiranya ingin membayar pada jangka masa yang pendek tidak perlu mengganti kepada sistem Ujrah. Sekiranya ingin membayar pada kadar minimum sahaja setiap bulan pada jangka masa yang ditetapkan Ujrah adalah jawabannya dan nasabah harus membayar secara istiqomah setiap bulan karena setiap bulan kos pentadbiran ini akan dikenakan pada setiap bulan. Dan bagi yang ingin menghabiskan pinjamannya secepat mungkin kekallah pada 3%. Dengan membayar lebih dari yang ditetapkan oleh PTPTN, membantu memendekkan jumlah pinjaman sekurangnya 10 Tahun.

[8] www.ptptn.gov.my pembiayaan kalkulator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap penerapan pembiayaan *Ujrah* di PTPTN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik yang terjadi di PTPTN Kuching,Sarawak berawal dari pihak PTPTN yang menggunakan pembiayaan *ujrah* pada pinjaman kepada nasabah,yaitu sebanyak 1% dan berarti para nasabah haruslah membayar semula pinjaman bersertakan *ujrah* yang ditetapkan PTPTN.
2. Penerapan *Ujrah* di PTPTN Kuching Sarawak tidak bersesuaian dengan hukum Islam yang sebenar seperti yang dikatakan PTPTN dan masih mengandungi riba seperti pembiayaan konvensional sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada pihak Fatwa Kebangsaan Malaysia hendaknya dalam hal ini perlu di kaji semula agar pembiayaan *ujrah* tidak sama seperti pembiayaan konvensional.
2. Kepada pihak PTPTN, harusnya sebagai lembaga PTPTN tidak boleh menggunakan hukum Islam sewenang-wenangnya tanpa menggunakan hukum Islam yang sebenar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzab* (*Al- Fiqh' Alal Madzahibil Arba;ah),* juz IV. Semarang: CV. As- Syifa', 1994.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Konstektual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Dayang, Mazni. *Wawancara.* Kuching Sarawak: t.p., 2018.

Department pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Helmi, Karim. *Fiqh muamalah.* Jakarta: Grafindo Persada II, 1997.

HamzahYa, qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam.* Bandung: Diponogoro,1984.

Majah, Ibnu*. Sunan Ibn Majah, Hadith Kitab Al-Ahkam, Bab: Ajr al-Ajr*, edisi ke-2. t.tp.,: Global Islamic Software Company, 1991.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*. Putrajaya: JAKIM, 2013.

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.*Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mohamad, bin Saari. *MemacuTransformasiPengurusan Hal Ehwal Islam*. Putrajaya: JabatanKemajuan Islam Malaysia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Yusri. *Wawancara.* Pejabat ptptn Sarawak: t.p.,2018.
Mohammad, Ahmad. *Wawancara.* Pejabat ptptn Sarawak: t.p., 2018.

Mohammad, Sahizam. *Kesanggupan Membayar Balik Pinjaman PTPTN Kajian Kes di Universiti Malaysia Terengganu*. Skripsi: Universiti Utara Malaysia, 2014.

Nurul, Asyiqah. *Wawancara*. Kuching Sarawak: t.p.,2018.

Ali, Nazurah. *Wawancara.* Bintulu Sarawak: t.p., 2018.

Partanto Pius, Barry Dahlan. *KamusIlmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

Pasaribu Chairuman, Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*

Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

RI Departemen Agama. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung:Diponegoro,

2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta,

2014.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Syaidatul Hajar, Syarifah Syakinah. *Wawancara,* Kuching Sarawak: t.p., 2018.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'rif, 1987.

Balqish, Sarimah Siti. *Wawancara.* Kuching Sarawak: t.p., 2018.

Aisyah, Siti. *Wawancara*, Kuching Sarawak: t.p., 2018.

Siti, Aisyah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya.*Skripsi: UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2010.

Ustaz Haji, Khalidi. *Wawancara*. Jabatan Agama Islam Sarawak: t.p., 2018.

Fatimah, Wan Zahraa. *AnalisisPembiayaan PTPTN Berasaskan Ujrah.*Skripsi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.

www.islam.gov.my.t.tp.,: t.p., t.t.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www.jais.Sarawak.gov.my. t.p.,t.t.,

www.ptptn.gov.my.t.tp.,: t.p., t.t.,

www.e-fatwa.gov.my. t.tp.,: t.p., t.t.,

www.fp.utm.my.t.tp.,: t.p., t.t.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id